

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)**



Oleh :

YULIARTA
2007/88768

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)**

**YULIARTA
2007/88768**

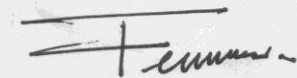
Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Maret 2013

Pembimbing I

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)**

YULIARTA

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : yulia_thaa@ymail.com

Abstrak

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak memenuhi karakteristik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah. Penulis ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan data primer. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel independen dan nilai informasi laporan keuangan sebagai variabel dependen. Setelah data di analisis, ditemukan bahwa semua faktor di atas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, jika kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang mengenai kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai nilai informasi.

Kata kunci: Nilai informasi, kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan keuangan daerah.

Abstract

Padang as the capital city of West Sumatra, based on the results of the Local Government Financial Reports Fiscal Year 2008 to 2010 received opinions qualified opinion. The results of this examination caused by Government Financial Statements did not complete the value of characteristics information from the financial statements it self. The value of local government financial reporting information is influenced by several factors: the financial administration officials competence, The system of internal control, and the control of regional finance. The writer wanted to know the effect those factors to the value of local government financial reporting information. To test this hypothesis, the writer used primary data. The techniques analysis using multiple regression analysis with the financial administration officials competence, The system of internal control and the control of regional finance as independent variable and the local government financial reporting information as dependent variable. After the data was analyzed, it found that all of the factors have a significantly give positive influence to the value of local government financial reporting information. It means, if the financial administration officials competence, The system of internal control, and the control of regional finance better than before, the information and financial report which produced by the government will be better also. It is recommended to the local government to do a review about the financial administration officials competence, The system of internal control, and the control of regional finance to make financial reporting so it has information value.

Key words: *Information value, the financial administration officials competence, The system of internal control, and the control of regional finance.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Menurut Suwardjono (2005), nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tausikal, 2007).

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan

(Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat akan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan pada akhir periode akuntansi tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk SKPD bersangkutan. Agar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan ini tidak menyesatkan pemakai, maka pihak penyedia informasi dalam hal ini adalah PPK-SKPD harus memiliki kompetensi yang cukup dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kompetensi yang memadai oleh para pelaksana akuntansi, maka nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan semakin membaik sehingga menjadi pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Hal kedua yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu : (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.

Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK mengimbau agar temuan tentang Sistem pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001). Apabila pengawasan telah

dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Di samping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil penelitian Fikri (2011) ditemukan lemahnya pengawasan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Padang sehingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di lingkungan Pemerintah Kota Padang pada Tahun 2010 BPK menemukan 10 penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah. Temuan BPK itu diantaranya adalah penggunaan langsung atas pendapatan klaim program Jamkesda dan program Jamkesmas 2010 RSUD Padang dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang sebesar Rp 4.185.521,947 (Padang Ekspres).

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 Kota Padang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti pemberian opini atas LKPD tahun 2007 yaitu

disclaimer. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 opini audit LKPD kota Padang tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan. Salah satu upaya konkritnya adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah (<http://padang.bpk.go.id/>).

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pernah dilakukan oleh Arfianti (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun klasifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa

satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Padang. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Padang karena adanya masalah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Padang yaitu opini WDP yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan LKPD Kota Padang tiga tahun berturut-turut.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Nilai Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode.

Menurut Suwardjono (2005), nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Menurut Suwardjono (2005), agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat terpenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai. Serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Kompetensi menurut badan Nasional Sertifikasi Profesi (dalam Noor Fuad & Gofur ahmad, 2009: 23) adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa : Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Dalam Yenita (2011), kompetensi dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari:

1. Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup
2. Minimal staf sub bagian penatausahaan keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih
3. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas
4. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah
5. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi
7. Telah melaksanakan proses akuntansi
8. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup

9. Dilakukannya pelatihan-platihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur SPIP mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi :

- 1) Lingkungan pengendalian
Pimpinan dan segenap pegawai di SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
- 2) Penilaian Risiko
Penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan SKPD.
- 3) Kegiatan pengendalian
SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD.
- 4) Informasi dan komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi dikatakan baik jika setiap pegawai di SKPD mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan baik individu, kelompok, dan SKPD secara umum dapat dicapai.

- 5) Pemantauan

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap gerak dan langkah seluruh unsur di SKPD berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

- 1) Pengaturan dan penetapan
- 2) Perencanaan dan penganggaran
- 3) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- 4) Pertanggungjawaban keuangan daerah
- 5) Pendapatan dan belanja daerah

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pernah dilakukan oleh Arfianti (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh

signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) di Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja,

aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan TUPOKSI yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya.

b. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Salah satu fungsi pengawasan

adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan segera dapat dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teori maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah :

- H₁ :Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Padang
- H₂ :Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Padang
- H₃ :Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Padang

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang berjumlah 45 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *total sampling*.

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPD dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari 45 SKPD yang terdapat di Kota Padang, setiap SKPD terdiri dari tiga responden.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y).
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (X1), sistem pengendalian intern pemerintah (X2) dan pengawasan keuangan daerah (X3).

Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang akan digunakan diadopsi dari penelitian yang telah ada dengan modifikasi penulis (**Tabel 1**).

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka nomor item tersebut tidak valid dan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item tersebut

dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden untuk pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan bantuan program SPSS.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogrov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan > 0,05 maka berdistribusi normal.

2. Uji Multikorelialitas

Uji multikorelialitas bertujuan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Untuk menguji adanya multikorelialitas dapat dilihat melalui nilai VIF dan nilai *tolerance*.

3. Uji Heteroedastisitas

Uji heteroedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan lain, jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroedastisitas. Jika sig di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroedastisitas.

Teknik Analisis Data

a. Koefisien Determinan (*adjusted R²*)

Uji R merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

b. Analisis Regresi Berganda

Analisis data menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y =Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X₁=Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

X₂=Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X₃=Pengawasan Keuangan Daerah

a =Nilai konstan

e =Standar error

c. Uji F (*F-test*)

Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika *P value* < (α) = 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

d. Uji Hipotesis (*t-test*)

Uji-t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikansi nilai t_{hitung} yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha=5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Definisi Operasional

1. Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk

mengarahkan, mengawasi, dan mengukur suatu sumber daya organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

3. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010).
4. Nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid dan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut hilang kekuatannya untuk mempengaruhi keputusan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah empat puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas-dinas pemerintahan di Kota Padang. Setiap SKPD masing-masing terdiri dari tiga responden. Dari empat puluh lima sampel tersebut, disebarkan sebanyak 111 kuesioner dari 37 SKPD, sementara 8 SKPD menolak. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali lengkap sebanyak 92 kuesioner dari 33 SKPD dan semuanya mengisi dengan lengkap. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 92 kuesioner.

Dari SKPD di Kota Padang yang disebarkan kuesioner hanya 82,88% diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 92$ adalah 0,1726. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan variabel X_1, X_2, X_3 dan Y adalah valid (**Tabel 2**).

Untuk instrumen nilai informasi laporan keuangan diketahui nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,224. Instrumen kompetensi pejabat penatausahaan keuangan nilai terkecil 0,371, sementara sistem pengendalian intern pemerintah 0,177. Dan untuk pengawasan keuangan daerah dengan nilai terkecil sebesar 0,406.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten (**Tabel 3**).

Untuk instrumen nilai informasi laporan keuangan 0,860, kompetensi pejabat penatausahaan keuangan 0,868, sistem pengendalian intern pemerintahan 0,870 dan pengawasan keuangan daerah 0,902. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, yang mana jika di nilai *asympt.sig (2-tailed) > 0,05* maka distribusi data dikatakan normal (**Tabel 4**).

Dari hasil pengolahan SPSS versi 16.0 didapat bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* $> 0,05$, yaitu

0.069. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikorelialitas

Uji multikorelialitas bertujuan untuk untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan independen. Untuk menguji adanya multikorelialitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikorelialitas (**Tabel 5**).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari *residual* atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (**Tabel 6**).

Uji Model

1. Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan 0,549. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap variabel terikat yaitu nilai informasi laporan keuangan 54,9%, sedangkan 45,1% ditentukan oleh faktor lain.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Secara rinci hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada **Tabel 7**:

$$Y = 10,682 + 0,425X_1 + 0,225X_2 + 0,192X_3$$

Keterangan :

Y= Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a =Konstanta

X_1 =Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

X_2 =Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X_3 =Pengawasan Keuangan Daerah

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 10,682 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah nol maka nilai informasi laporan keuangan adalah sebesar konstanta 10,682.
2. Koefisien kompetensi pejabat penatausahaan keuangan sebesar 0,425 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,425 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,225 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,225 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien pengawasan keuangan daerah sebesar 0,192 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengawasan keuangan daerah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,192 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan tabel 19, nilai sig 0,000^a menunjukkan bahwa variabel

independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $F_{hitung} = 37,889$ dan $F_{tabel} = 2,71$. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

4. Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan $\alpha = 0,05$ atau dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.682	3.551		3.008	.003
Kompetensi	.425	.095	.422	4.484	.000
SPIP	.225	.073	.301	3.083	.003
PengawasanK euDae	.192	.089	.171	2.158	.034

a. Dependent Variable:
NilaiinformasiLK

Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi pejabat penatausahaan yang dilakukan oleh SKPD, maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono (2004), dalam menghasilkan suatu

informasi yang bernilai menyangkut 2 elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut sumber daya yang menghasilkan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) harus mempunyai kompetensi di bidang akuntansi atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan TUPOKSI yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Hal inilah yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dan kebijakan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang bernilai informasi dan bermanfaat bagi pemakai.

Kepala BPKP Sumbar Eddy Mulyadi (Padangmedia.com.2011) menilai bahwa Pemda Sumbar telah berupaya memperbaiki opini *disclaimer* pada LKPD Sumbar di tahun 2009 lalu. Terbukti pada tahun 2010 LKPD Sumbar telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meski demikian, Pemda harus berupaya meningkatkan SDM yang dapat menyusun LKPD yang sesuai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Guna meningkatkan kualitas opini LKPD, BPKP siap memberi pelatihan pada SDM keuangan negara di daerah sehingga bisa menyusun LKPD sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh SKPD, maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wahyono (2004) yang menyatakan bahwa proses pengendalian intern yang menghasilkan data keuangan dan non keuangan merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang berkaitan dengan informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah, seyogyanya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam kerangka reformasi birokrasi. Dengan kualitas pengendalian intern yang semakin baik maka keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan diyakini akan semakin kecil. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintah di mata masyarakat akan semakin baik, apabila dikaitkan dengan nilai informasi maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern pemerintah.

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun Anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2010 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Ini berarti tidak ada

peningkatan opini dari tahun 2008 sampai 2010. Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi menurunnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang di antaranya masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah (BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, 2011)

3. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh SKPD, maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Tausikal (2007) menyatakan bahwa untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Diperlukan pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*) Aparat pengawas Intern pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi kolupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari hasil penelitian ini diketahui peran SKPD dalam pengawasan keuangan daerah telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan

SAP. Peningkatan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh SKPD ini sangat penting karena semakin baik pengawasan keuangan daerah, maka semakin baik pula nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di Kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/ pernyataan dalam kuesioner serta kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan keuangan daerah
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dan lain-lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten batang)*. www.google.com akses 10 Maret 2012.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. <http://www.bpk.go.id/web/?p=9982> akses 14 maret 2012.
- Fikri, Miftahul. 2011. *Pengaruh SIKD dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah kota Padang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us.

- Indriasari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Pontianak. Jurnal SNA.
- Noor Fuad & Gofur Ahmad. 2009. *Integrated Human Resources*. Jakarta : Grasindo.
- Padang ekspres. 2012. *BPK Minta Wako Taati Aturan*. www.google.com. Tanggal akses 14 Maret 2012
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Tausikal, Askam. 2007. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sektor Publik. Vol. 8, No. 1
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Yenita, Devi. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Zetra, Aidini. 2009. *Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. www.google.com

Tabel 1
Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Acuan
1.	Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterandalan (<i>reliability</i>) 2. Keterpahaman (<i>understandbility</i>) 3. Keberpautan (<i>relevance</i>) 4. Nilai prediktif (<i>predictive value</i>) 5. Nilai balikan (<i>feedback value</i>) 6. Ketepatanwaktuan (<i>timeliness</i>) 7. Ketepatan penyimbolan (<i>representational faithfulness</i>) 8. Keterujian (<i>verifiability</i>) 9. Kenetralan (<i>neutrality</i>) 10. Keterbandingan (<i>comparability</i>) 11. Materialitas (<i>materiality</i>) 	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
2.	Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf yang berkualifikasi 2. Staf lulusan akuntansi 3. Uraian peran dan fungsi yang jelas 4. Peran dan tanggung jawab yang jelas 5. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi 6. Pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi (SAP) 7. Pelaksanaan proses akuntansi 8. Sumber daya pendukung operasional 9. Pelatihan-pelatihan untuk penguasaan dan pengembangan keahlian 	GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Yenita, 2010)
3.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan 	PP No. 60 Tahun 2008
4.	Pengawasan Keuangan Daerah (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah 2. Pertanggungjawaban keuangan daerah 3. Pendapatan dan belanja daerah 	Permendagri No. 23 Tahun 2007

Tabel 2
Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	0,224
Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X1)	0,371
Sistem Pengendalia Intern Pemerintah (X2)	0,177
Pengawasan Keuangan Daerah (X3)	0,406

Sumber : Data Primer yang diolah, 2012

Tabel 3
Nilai Cronbach's Alpha

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	0,860
Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X1)	0,868
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0,870
Pengawasan Keuangan Daerah (X3)	0,902

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Tabel 4
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.61601287
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.135
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		1.296
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069

a. Test distribution is Normal.

Tabel 5
Uji Multikorelitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi	.560	1.787
	SPIP	.519	1.927
	PengawasanKeuDae	.794	1.259

a. Dependent Variable: NilaiinformasiLK

Tabel 6
Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.056	2.031		.028	.978
	Kompetensi	-.053	.054	-.137	-.974	.333
	SPIP	.061	.042	.214	1.464	.147
	PengawasanKeuDae	.009	.051	.021	.181	.857

a. Dependent Variable: Absut